e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

BITUNG, PEMERINTAHAN DAN INFRASTRUKTURNYA: KAJIAN SEJARAH KOTA

Oleh:
Hisna[1], Yeni Astuty[2], Hasdairta Laniampe[3], Bainudin[4], Taufiq Said[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo
(Email: hisna@uho.ac.id)

Abstract

This study focuses on the history of the growth of Bitung City, the government, and the infrastructure of Bitung City to see the history and dynamics of the city that occurred in it. This study examines the change of Bitung City from a village to a town. Continuous development in a village allows the birth of a city. That process is likely to present problems in urban areas and will certainly also impact humans who have occupied the area. This study uses historical methods that include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography (historical writing). The results indicate that at the beginning Bitung was inhabited by a husband and wife, Simon Tudus and Mampirang (the 19th century). The change of Bitung from a wild forest area to a city with various infrastructures began with the struggle of this husband and wife. In its historical journey, Bitung developed due to several ethnic groups from Kema, Tondano, Gorontalo, Makassar, Bugis, Ternate, Tidore, Sangir, and other tribes. The arrival of these tribes aimed to find the necessities of life until they occupied the coastal area of Bitung to build houses as a place to live. Therefore, every human has a means to follow the changes and adapt to the environment. As a result, Bitung, which was previously only a little hamlet, then developed into a large city and was increasingly developed and even dubbed as a city of government, trade, industry, port, fisheries, and tourism.

Keywords: History, Government and Infrastructure, Bitung City

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada sejarah pertumbuhan Kota Bitung, pemerintahan dan infrastruktur Kota Bitung serta untuk melihat sejarah dan dinamika kota yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini mengkaji perubahan kota Bitung dari desa menjadi sebuah kota. Perkembangan secara terus-menerus pada sebuah desa memungkinkan kelahiran sebuah kota. Proses pada sebuah desa tersebut berpotensi menghadirkan permasalahan di wilayah perkotaan dan tentu juga akan berdampak pada manusia yang telah menempati wilayah perkotaan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya Bitung dihuni oleh sepasang suami istri, Simon Tudus dan Mampirang sekitar abad 19. Perubahan Bitung dari wilayah berupa hutan liar menjadi kota yang memiliki berbagai infrastruktur ini diawali oleh perjuangan sepasang suami istri ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Bitung berkembang akibat kehadiran beberapa kelompok suku bangsa dari Kema, Tondano, Gorontalo, Makassar, Bugis, Ternate, Tidore, Sangir dan suku-suku lain. Kedatangan suku-suku ini bertujuan untuk mencari kebutuhan hidup hingga menempati wilayah pesisir Bitung untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal. Oleh karenanya setiap manusia memiliki cara untuk mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana tempat ia berada. Akibatnya, Bitung yang sebelumnya hanya berupa dusun kecil, kemudian berkembang menjadi kota besar dan semakin berkembang dan bahkan dijuluki sebagai kota pemerintahan, perdagangan, industri, pelabuhan, perikanan dan pariwisata.

Kata Kunci: Sejarah, Pemerintahan dan Infastruktur, Kota Bitung

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

1. PENDAHULUAN

Kota Bitung sangat menarik untuk dibicarakan, bukan saja karena peran historis yang telah dimainkannya selama sejak kurun waktu setengah abad, melainkan juga keberadaannya sebagai sebuah kota. Kota dalam berbagai wujudnya selalu memperlihatkan kecenderungan dan keberlanjutan yang kadang-kadang unik. Sejarah mencatat bahwa di banyak kota di Indonesia sering kali terbentuk kotanya tanpa perencanaan sebelumnya. Menurut Egon E. Bergel dalam Basundoro (2012: 1) kota pada awalnya adalah sebuah desa yang mengalami perubahan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kota. Perubahan itu misalnya dapat diartikan dari; desa berubah menjadi kota kecil, kota kecil berubah menjadi kota sedang, kota sedang akan berubah menjadi kota besar.

Konsep tersebut memiliki relevansi dengan berdirinya Bitung sebagai kota yang sebelumnya dari dusun kecil. Sebagai sebuah wilayah yang tergolong maju menjadi kota, Bitung memiliki banyak keunikan tersendiri. Di mana selain dijuluki sebagai kota pelabuhan juga menjadi kota perdagangan, industri, pariwisata, perikanan dan sekaligus sebagai pusat kota pemerintahan (Bappeda, 1995:4). Secara historis perjalanan Bitung menjadi sebuah kota tidak dapat dilepaskan dari kedatangan komunitas kecil ke wilayah pesisir Bitung. Mereka dari kalangan umat Kristiani yang berjumlah dua belas (12) keluarga. Selama menempati wilayah pesisir Bitung profesi nelayan menjadi mata pencaharian utama untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Komunitas yang menempati wilayah pesisir Bitung semakin hari semakin bertambah hingga pada tahun 1918, Bitung dibentuk menjadi desa dan selanjutnya berubah status menjadi kota pada tahun 2001 (Lomban dkk, 2009: 16). Terdapat berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya selama berubah menjadi kota. Oleh karenanya Kota Bitung menarik untuk dikaji agar mengetahui indikator perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di dalamnya, baik dari aspek historis, pemeritahan maupun sarana-prasarana dalam kota.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kota dengan menggunakan metode sejarah yang dikemukakan oleh Gottschalk (1975:18-32) yang terbagi atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Selain itu, penulis melengkapinya dengan melakukan studi lapangan, yakni wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup spasial, temporal dan keilmuan. Ruang lingkup spasial merujuk pada objek penelitian. Sesuai judul yang diutarakan oleh penulis bahwa penelitian ini difokuskan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ruang temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1918-2001. Penelitian ini diawali tahun 1918 karena pada tahun tersebut, Bitung menjadi desa yang diakui secara administrasi. Batasan temporal tahun 2001 dipilih sebagai akhir periode penelitian karena di tahun ini Bitung resmi menjadi kota, yaitu Kota Bitung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Bitung baik dari aspek sejarah, pemerintahan dan infrastrukturnya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Wilayah Kota Bitung

3.1.1 Keadaan Geografis dan Ekologis

Secara geografis, Kota Bitung terletak pada posisi 1°23’23”-1°35’39” Lintang Utara (LU) dan 125°’1’43”-125°-18’13” Bujur Timur (BT). Secara administratif wilayah daratan Bitung mempunyai luas daerah 313, 50 km^{2}, terbagi dalam delapan kecamatan yaitu Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Maesa, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Madidir, dan Kecamatan Lembeh Selatan. Wilayah perairan Bitung memiliki luas 439,8 km^{2}, dengan panjang garis pantai 143,2 km, terdiri dari 46,3 km mengelilingi daratan utama dan 96,9 km mengelilingi Pulau Lembeh serta pulau-pulau kecil lainnya (Badan Pusat Statistik Bitung, 1994: 15).

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Gambar 1. Peta Administratif Kota Bitung/Sumber: Bappeda Bitung Tahun 2001

Dilihat dari aspek topografis, sebagian besar daratan Kota Bitung (45,06%) berbukit, 32,73% bergunung, dan 4,18% dataran landai serta 18,03% berombak mulai dari bagian timur sampai pesisir Pantai Aertembaga dan Tanjung Merah. Bagian barat merupakan dataran yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0-15^0. Secara fisik lokasi ini berpotensi untuk dijadikan sebagai wilayah perkotaan, pemukiman, industri, jasa dan perdagangan. Pada bagian utara, keadaan topografi Bitung semakin bergelombang dan berbukit-bukit. Lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung, pertanian, cagar alam, dan perkebunan. Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yakni Pulau Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura, dan palawija. Pulau Lembeh memiliki pesisir pantai yang begitu indah dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari (Badan Pusat Statistik Bitung, 1996: 17).

Di Kota Bitung terdapat delapan buah gunung yaitu Gunung Duasudara dengan ketinggian 1.351 m, Gunung Tangkoko 774 m, Gunung Batuangus 1.099 m, Gunung Klabat 1.990 m, Gunung Woka 370 m, Gunung Lembeh 430 m, Gunung Temboan Sela 430, dan Gunung Wiau 861 m. Gunung Batuangus masih tercatat sebagai gunung berapi namun sudah tidak aktif lagi. Beberapa gunung lainnya cocok dijadikan sebagai tempat wisata alam, seperti Gunung Duasudara dan Gunung Klabat. Selain itu terdapat lima buah sungai kecil yang bermuara di Selat Lembeh, yaitu Sungai Girian, Sungai Sagerat, Sungai Tanjung Merah, Sungai Tewaan, dan Sungai Rindonoran. Sebagaimana bagian lain Indonesia, Bitung juga mengalami musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini sangat berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di wilayah Bitung. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan April biasanya terjadi hujan. Hal ini disebabkan karena angin bertiup dari arah barat atau barat laut yang banyak mengandung air. Sementara pada bulan Juni sampai dengan bulan September, terjadi musim kemarau karena dipengaruhi oleh arus angin dari arah timur yang tidak banyak mengandung air (Bappeda, 2001: 36).

Tahun 2005, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Bitung, secara umum suhu rata-rata per bulan yang terendah terjadi pada bulan Juli yakni 26,4^o C dan tertinggi 28,6^o C pada bulan Mei sampai November. Sebagai daerah tropis, wilayah Bitung mempunyai kelembapan udara relatif tinggi dengan rata-rata per bulan berkisar antara 70% sampai dengan 90%. Menurut Stasiun Meteorologi Bitung, jumlah curah hujan di wilayah ini cukup beragam pada setiap bulannya. Curah hujan tertinggi selama tahun 2005 terjadi pada bulan November dan mencapai 312 mm,

sedangkan pada bulan Agustus curah hujan mengalami titik rendah bahkan tidak tercatat. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari yakni sebanyak 25 hari (Badan Pusat Statistik Bitung, 2005: 28).

3.1.2 Potensi Wisata

Bitung sebagai daerah wisata bahari memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang dari mancanegara. Selat Lembeh memiliki panoroma alam yang indah. Selat ini dikenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati laut yang banyak serta menjadi salah satu objek wisata di Sulawesi Utara. Bahkan, karena keragaman biota lautnya yang begitu banyak dan spesifik, tempat ini menjadi surga fotografi bawah laut dan sering disebut sebagai kiblat dari fotografi makro. Selat Lembeh diakui oleh para wisatawan mancanegara memiliki keindahan biota laut yang menarik perhatian para pengunjung (Badan Pusat Statistik Bitung, 1997: 68). Bila Bunaken dikenal dengan keindahan karang lautnya, maka Selat Lembeh dikenal akan keaenekaragaman flora dan fauna bawah lautnya sehingga mayoritas wisatawan mancanegara dalam setiap tahunnya terus berkunjung di Selat Lembeh (Pulau Lembeh).

Keadaan pantai Selat Lembeh termasuk pantai erosi gelombang dan proses abrasinya lebih dominan dari pada pembentuk endapan-endapan darat. Erosi tidak bekerja dengan kekuatan yang sama di sepanjang garis pantai, karena bentuk garis pantai tidak merupakan garis lurus, melainkan berkelok-kelok tidak beraturan. Pantai di sepanjang Selat Lembeh merupakan pantai primer (Bappeda, 2001: 81). Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya sedimentasi yang bermakna di sepanjang garis pantai Selat Lembeh tersebut. Selat Lembeh merupakan perairan sempit yang memisahkan daratan utama Pulau Sulawesi dengan Pulau Lembeh, sehingga secara geografis lokasi ini sangat tepat menjadi wisata bahari.

3.2 Mengurai Historis dan Pemerintahan Kota Bitung

Bitung adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Bitung di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa) dan Laut Maluku, sebelah timur dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa). Asal usul nama Bitung berasal dari kata "*Balisung*" yang artinya tempat perteduhan atau negeri sentosa (Zaenuddin, 2014: 106). Adapun dalam kamus bahasa Sangihe-Belanda (*Sangirees Nederlands Woordenbook*) yang tulis oleh N. Adrian tahun 1893, istilah Bitung dalam bahasa Sangir adalah nama sebuah pohon, sementara dalam bahasa Belanda disebut *stevige koroestige boom.* Pohon ini berdaun rindang dan sepintas pohon itu seperti sebuah payung besar yang dapat menaungi orang yang berteduh di bawahnya, sehingga orang yang berada di bawah pohon tersebut merasa nyaman. Dari kedua arti kata tersebut terdapat kesamaan maksud, yaitu kedamaian dan kesejahteraan. Jadi dapat disimpulkan Kota Bitung adalah kota yang damai dan sejahtera (Lomban dkk, 2009: 13).

Dikisahkan bahwa munculnya nama Bitung tidak terlepas dari perjuangan sepasang suami istri bernama Simon Tudus dan istrinya Mampirang. Simon Tudus bersama Mampirang datang ketika wilayah tersebut masih belum dihuni oleh manusia pada akhir Abad 19. Pada waktu itu daerah yang sekarang menjadi Bitung masih merupakan hutan liar dan sarang nyamuk, ular berbisa, buaya dan monyet. Simon Tudus sebenarnya berasal dari Sawangan Airmadidi. Berawal dari suatu kemauan dan tekad untuk membuka sebuah *huma* (kebun) di kawasan yang terletak di tepian pantai, Simon Tudus membangun sebuah gubuk atau pondok untuk tempat berteduh (Tim Penelitian Penelusuran Wilayah Bitung, 2015: 3). Pondok tempat berteduh Simon Tudus berada di bawah naungan sebatang pohon besar yang bernama pohon Bitung (sekarang pohon tersebut tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Bitung dan kurang lebih 3 meter dari tepian pantai pada saat air laut pasang naik). Di

pondok Simon Tudus selalu ada nyala api, sehingga pondok tersebut dijadikan tempat singgah dan berteduh para nelayan tradisional yang datang dari Kema, Tondano, Gorontalo, Makassar, Bugis, Ternate, Tidore dan Sangir untuk berlindung dari cuaca buruk pada saat melaut (Lomban dkk, 2009: 12).

Berdasar pada kisah itu, Simon Tudus merupakan orang pertama yang datang di Bitung. Pada suatu hari yang cerah ia sedang berteduh dalam pondoknya yang terbuat dari tiang batang pohon nibun dan beratap daun nibun yang biasa disebut daun woka. Simon Tudus memperhatikan ke atas pohon, tampaknya banyak jenis burung yang datang silih berganti hinggap di pohon bitung. Simon Tudus berfirasat bahwa pada suatu hari tempat ini kelak akan ramai dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku bangsa (Tampubolon dkk, 2015:1). Seiring berjalannya waktu, lambat laun nama pohon Bitung digunakan sebagai nama tempat itu yang kemudian berkembang menjadi satu dusun kecil. Pada waktu itu orang-orang yang mendiami pesisir Pantai Bitung hanya berjumlah 12 keluarga dan mayoritas beragama Kristen. Adapun nama-nama keluarga Kristen tersebut adalah Elias Lonto Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langi Langelo, Marthinus Langelo, Andries Rompis, Mais Pantouw, Benyamin Wangi, Andries Hendrik Dulag Kansil, Yesaya Mulalutan, Tehopilus Bawotong, Frendrik Tindatu, dan Mamuko Labaeng. Mereka inilah yang merupakan perintis terbentuknya Desa Bitung (Tim Kerja Penelusuran Wilayah Bitung, 2015: 2).

Pada Tahun 1926, tiga orang utusan dari Desa Bitung yaitu Theopilus Bawotong, Fredrik Tindatu, dan Andries Hendrik Dulag Kansil pergi menghadap Hukum Besar (setingkat dengan camat) Tonsea, Ernest Palengkahu, di Airmadidi untuk meminta pengakuan Bitung sebagai sebuah desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Madidir. Permintaan itu dikabulkan sehingga pada tahun 1927 Bitung resmi menjadi sebuah desa yang mandiri. Elias Lonto Sompotan (cucu Simon Tudus) diangkat sebagai Hukum Tua pertama, selanjutnya pada tahun 1929 Hukun Tua digantikan oleh Hendrikus Langelo. Pada masa pemerintahan Langelo, pemukiman penduduk makin ramai dikunjungi oleh berbagai suku khususnya yang berasal dari Sangir Talaud, Kema, Gorontalo, Maluku, Ternate, Bugis, Bolaang Mongondow, Tidore dan lain-lain. Kebanyakan mata pencaharian para pendatang ini adalah sebagai nelayan, dan ada juga yang memilih mata pencaharian sebagai petani, serta tukang bangunan (Lomban dkk, 2009:13-14).

Bitung sebagai sebuah desa yang mandiri terus berkembang. Sampai pada tahun 1947, Bitung resmi menjadi distrik bawahan (*onderdistrik*) yang terpisah dari distrik Kauditan. Adapun Hukum Tuanya adalah B. Ompi. Pada masa kepemimpinan B. Ompi, Bitung sudah terdiri dari 11 desa dengan luas wilayah 19.870 Ha dan jumlah penduduk sebesar 13.428 jiwa. Melihat perkembangan daerah Bitung yang semakin ramai dengan aktivitas pelabuhannya, maka Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 244 tahun 1964 tentang perubahan status Bitung dari *onderdistrik* menjadi Kecamatan Bitung. Setelah status Bitung berubah menjadi kecamatan, luas wilayahnya terus berkembang pesat hingga menjadi 29.788 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 32. 000 jiwa yang tersebar di 28 desa (Bappeda Daerah Tingkat II Bitung, 1995:2). Salah satu hal yang menjadikan Bitung berkembang sangat pesat adalah adanya pengembangan Pelabuhan Bitung. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Bupati Minahasa menetapkan pembangunan untuk Kota Bitung yang meliputi luas wilayah 10 km^2. Selain itu juga dibentuk Dinas Pembangunan Kota Bitung sebagai teknis perencana dan pelaksana pembangunan Kota Bitung. Pada tahun 1971, Bupati Minahasa menetapkan struktur organisasi penghubung atau pembantu bupati di Bitung. Adapun tugas dari penghubung tersebut adalah sebagai koordinator untuk memudahkan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bitung. Koordinator pembangunannya adalah M. Lumingkemas dan Kecamatan Bitung dipimpin oleh H. L Kaunang (Tampubolon dkk, 2015: 10).

Tanggal 2 Juli tahun 1974, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang menjadi kepala atas tiga lembaga yang ada di Bitung, yakni Penghubung Bupati, Camat, dan Kepala Dinas Pembangunan Kota Bitung. Tujuan diangkatnya Worang sebagai pejabat adalah untuk

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

meningkatkan dan memperlancar koordinasi pelaksanaan pembangunan serta kemajuan Kota Bitung. Setahun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, tepatnya pada tanggal 10 April tahun 1975 Kecamatan Bitung diresmikan menjadi kota administrasi dan W. A. Worang diangkat sebagai walikota pertama Bitung. Ketika itu daerah Bitung semakin berkembang dengan luas wilayah 30.400 Ha, terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa (Bappeda Daerah Tingkat II Bitung, 1995: 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990, yaitu tepat tanggal 10 Oktober tahun 1990 Kota Administrasi Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang peresmiannya dilakukan oleh Rudini selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu. Sarundajang diangkat sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung yang pertama. Pada masa pemerintahan Sarundajang, daerah Bitung semakin berkembang bahkan melebihi kota-kota lain di wilayah Sulawesi Utara. Memasuki era otonomi daerah, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 penyebutan Kotamadya Bitung berubah menjadi Kota Bitung sampai sekarang (Pojoh, 2010:53).



Gambar 2. Letak Bitung di Peta Sulawesi Utara/Sumber: Bappeda Kota Bitung Tahun 2001

3.3 Infrastruktur Kota Bitung

Kelahiran sebuah kota pada hakikatnya melalui proses sejarah yang cukup panjang dengan memperlihatkan perkembangan dan perubahan baik pada kondisi fisik maupun nonfisik. Perubahan fisik kota dapat dilihat pada bangunan dan perkampungan lama masyarakat yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Sementara perubahan nonfisik kota dapat dilihat pada perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat kota. Kota merupakan wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks. Dari aspek ekonomi, kota diartikan sebagai pusat produksi, perdagangan, dan distribusi dengan basis kesatuannya ialah organisasi-organisasi ekonomi (Basundoro, 2012: 11).

Max Weber memberikan pandangannya bahwa kota adalah suatu pemukiman penduduk yang lebih mengutamakan kehidupan perdagangan dan komersial daripada pertanian. Di sini Weber menekankan bahwa kota merupakan tempat pasar atau sebuah pemukiman pasar. Dilihat dari segi sejarahnya, kota adalah tempat kelahiran peradaban dunia yang mana di kotalah menjadi tempat bagi pembentukan peradaban yang lebih tinggi. Konsep tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fernand Braundel yang menganggap bahwa kota merupakan produk dari peradabannya

(Basundoro, 2012: 12). Untuk memahami dinamika perubahan dan karakteristik suatu kota, maka perlu dikaji sejarahnya. Oleh sebab itu, Kota Bitung sangat penting dan menarik untuk ditulis sejarahnya, terutama pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemeritah daerah. Terdapat beberapa infrastruktur penting di Kota Bitung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut antara lain:

3.3.1 Prasarana Jalan

Infrastuktur jalan adalah salah satu sarana yang urgen untuk menopang kemajuan perekonomian sebuah wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan di suatu wilayah sangat penting untuk dilakukan sebab menjadi pendukung utama dalam memperlancar pergerakan atau pertumbuhan ekonomi. Pada masa lalu, Bitung menjadi sebuah desa kecil yang selalu ramai dikunjungi oleh berbagai suku bangsa termasuk orang Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan sekitar Sulawesi Utara. Kedatangan suku-suku ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang memengaruhi sehingga mengharuskan mereka untuk ke Bitung. Sebab Bitung merupakan sebuah wilayah yang notabenenya daerah pesisir dan penghasil perikanan terbesar di Sulawesi Utara, sehingga tidak mengherankan bila Bitung dijuluki sebagai kota perikanan, industri, pelabuhan, perdagangan dan parawisata (Rudini dkk, 1992: 40). Melihat potensi ekonomi yang dimiliki maka sarana jalan menjadi penting untuk terus dikembangkan pemerintah sebagai penunjang aktivitas masyarakat Bitung dan wilayah sekitarnya. Terlebih prasarana jalan dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di Kota Bitung. Berikut gambar fasilitas jalan di Kota Bitung.



Gambar 3. Failitas Jalan di Kota Bitung/Sumber: Bappeda Kota Bitung Tahun 2001

Peningkatan jalan di daerah Bitung dari tahun ke tahun semakin dikembangkan hingga menjangkau daerah-daerah produksi yang pada gilirannya dapat membuka keterisolasian sehingga produksi daerah terus meningkat. Hal itu terbukti pada tahun 1991 panjang jalan di kota tersebut mencapai 197,06 km (Bappeda, 1991: 55). Bahkan di tahun 2005 panjang jalan meningkat menjadi 232.42 km (Bappeda, 2005: 28). Berkembangnya prasarana jalan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya jumlah sarana angkutan dan aktivitas perekonomian wilayah Kota Bitung.

3.3.2 Moda Transportasi

Terdapat dua moda transportasi di Kota Bitung antara lain; transportasi darat dan laut. Untuk sarana transportasi darat di kota ini telah tersedia sarana angkutan umum yang terdiri atas mikrolet sebagai angkutan di dalam Kota Bitung dan bus sebagai angkutan antarkota atau antardaerah yang menghubungkan trayek Bitung-Manado, Bitung-Tondano, Bitung Gorontalo dan Bitung-Palu (Bappeda, 1995:62). Lancarnya angkutan di wilayah ini baik aktivitas sosial maupun ekonomi

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

didukung oleh sarana jalan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah sebagai fasilitas penting dalam memudahkan mobilitas penduduk. Terlebih Bitung sebagai kota industri, pelabuhan, pariwisata, perdagangan dan perikanan harus didukung oleh fasilitas jalan yang memadai untuk kelancaran arus barang dan jasa. Selain moda angkutan darat, sarana angkutan laut juga terdapat di Kota Bitung. Berikut gambar angkutan darat dan laut di Kota Bitung.



Gambar 4. Angkutan darat dan Laut di Kota Bitung/Sumber. Bappeda Kota Bitung tahun 2001

Moda transportasi laut telah dipusatkan di pelabuhan, baik itu pelabuhan ferry maupun pelabuhan samudera Bitung. Kedua pelabuhan tersebut masing-masing mempunyai peran penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menghubungkan pulau-pulau kecil maupun pulau besar di Indonesia baik di sekitar Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa, Bali dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

3.3.3 Pasar

Salah satu fasilitas terpenting di kota adalah pasar. Pasar mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Max Weber memberikan pandangannya mengenai "kota" bahwa karakteristik yang menonjol pada kota adalah aktivitas pasarnya. Dalam kaitan itu, masyarakat kota pada umumnya mayoritas hidup dari perdagangan, industri atau perusahaan (Rabani, 2010: 95). Fungsi pasar dalam suatu kota sangat menonjol dan menjadi barometer perkembangan kota. Frekuensi arus barang dan komoditas yang masuk dan keluar dari pasar, kelompok sosial yang terlibat dan sebagainya menggambarkan kondisi riil dari aktivitas masyarakat kota. Oleh sebab itu, kegiatan dan kebutuhan masyarakat termasuk penduduk Kota Bitung dapat dipenuhi karena adanya pasar, yakni pasar Girian. Bahkan dalam melakukan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya penduduk Kota Bitung harus datang ke Pasar Girian.

Masyarakat Kota Bitung identik melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaaan (pedalaman). Barang-barang dagangan dibawa melalui laut dan darat (mobil dan perahu). Kondisi tersebut telah membuktikan bahwa terdapat konektivitas perdagangan antara masyarakat kota (pedang kota) dan masyarakat pedesaan (pedagang desa) dalam transaksi jual beli hasil pertanian dan perkebunan. Pasar Girian telah menjadi tempat yang efektif bagi mereka dalam melakukan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara geografis posisi Pasar Girian sangat strategis, dimana terletak di sekitar pelabuhan Bitung. Pasar ini dibangun permanen pasca Indonesia merdeka. Selama menjadi pasar permanen terdapat beberapa suku yang memanfaatkan pasar tersebut seperti Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Bugis Makassar, Buton, Ternate, Tionghoa, Toraja, Batak, Jawa dan Minang (Wawancara dengan Bapak La Site, 2017).

Suku-suku ini menjual berbagai macam kebutuhan penduduk Bitung mulai dari sembilan bahan pokok (beras, garam, minyak, bumbu dapur, buah-buahan, sayur mayur), pakaian, peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian tidak mengherankan jika suku-suku tersebut menetap dan tinggal di Bitung karena didukung oleh faktor ekonomi yang menjanjikan keberlangsungan hidup mereka.

3.3.4 Air Bersih

Ketersediaan air bersih menjadi penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena air menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Air memberikan banyak manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan manusia termasuk masyarakat Kota Bitung. Sejak menjadi desa tahun 1918 hingga beralih status menjadi kota di tahun 2001, Bitung dikenal sebagai wilayah yang memiliki air bersih yang berkualitas baik. Oleh karena itu, masyarakat setempat memanfaatkan air bersih tersebut untuk kebutuhan memasak, mencuci, mandi dan kebutuhan lainnya (Wawancara dengan Bapak Willian, 2017). Dalam pendistribusian air bersih, pemerintah selalu menerapkan pembagian merata kepada masyarakat sehingga tidak terdapat kecemburuan sosial atau konflik antarmasyarakat setempat. Bahkan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Bitung saja, melainkan kapal-kapal yang melitas di perairan Bitung juga mengambil air di Bitung untuk kebutuhan penumpang (masyarakat) yang melakukan perjalanan laut (Badan Pusat Statistik Biutung, 2001: 94).

3.3.5 Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan adalah salah satu wadah penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kota Bitung. Pemerintah kota di wilayah ini memerhatikan kemajuan sumber daya manusianya. Hal itu terlihat dari visi misi pemerintah Bitung. Adapun visi misinya yaitu “Terwujudnya Bitung kota industri maritim dan bahari yang memiliki sumber daya manusia handal, mandiri dan “sadar” (sejahtera, aman, demokratis dan religius) (Lomban dkk, 2009: 43). Dengan adanya pernyataan visi misi organisasi di atas, maka untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan handal pemerintah Kota Bitung terus berupaya menyiapkan masyarakat yang berkualitas dan berkemampuan tinggi sehingga mampu bersaing di era globalisasi dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai etika, moral dan religiusitas. Peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kota Bitung dari tahun ke tahun terus dilakukan terutama pendidikan di kalangan anak-anak dan remaja didukung oleh fasilitas sekolah formal (SD, SMP, SMA/SMK dan Sekolah Tinggi Swasta) maupun nonformal (PAUD dan Lembaga Kursus). Sarana sekolah seperti SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi swasta menjadi wadah untuk mengembangkan pendidikan, sehingga secara perlahan namun pasti kualitas sumber daya manusia di Kota Bitung meningkat dan setara dengan kota-kota maju di Indonesia.



Gambar 5. Fasilitas Kesehatan Kota Bitung/Sumber: Bappeda Kota Bitung Tahun 2001

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Selanjutnya, selain fasilitas pendidikan di Kota Bitung juga tersedia sarana kesehatan seperti terlihat pada gambar 5. Sarana kesehatan tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 2001. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, pemerintah kota telah melakukan beberapa program pada bidang kesehatan meliputi; pembebasan biaya berobat ke puskesmas dan rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu, pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian pengadaan dan pengawasan obat, makanan serta bahan berbahaya bagi kesehatan, perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan serta peningkatan dan pemantapan pelaksanaan manajemen pada bidang kesehatan (Bappeda, 2001: 72). Dengan demikian kinerja pemerintah kota di bidang kesehatan perlu diapresiasi, sebab telah mampu merealisasikan programnya dalam peningkatan dan pengawasan terhadap masyarakat terutama di bidang kesehatan.

3.3.6 Fasilitas Ibadah

Pembangunan manusia seutuhnya merupakan cita-cita luhur yang patut direalisasikan melalui pendidikan mental khususnya spiritual baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk Kota Bitung yang heterogen terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya dan telah menampakkan adanya keseimbangan perilaku. Masyarakat saling menghormati, menghargai serta kerukunan antarumat beragama sangat terasa dengan berpedoman pada jiwa kebersamaan. Penghayatan kehidupan beragama tidak terlepas dari ketersediaan prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat juga dengan pembinaan kelembagaan yang ada di Kota Bitung. Masyarakat Kota Bitung mayoritas beragama Kristen sehingga fasilitas gereja mendominasi. Setelah agama Kristen, yang beragama Islam berada di urutan ke dua dan masjid menjadi tempat ibadah.



Gambar 6. Fasilitas Gereja dan Mesjid/ Sumber: Bappeda Kota Bitung Tahun 2001

Selanjutnya etnis Tionghoa menggunakan Klenteng sebagai tempat ibadah. Selama itu hubungan antarumat beragama di Kota Bitung berjalan dengan baik dan penuh persaudaraan serta saling gotong royong satu sama lain. Hal itu tercipta karena adanya sikap toleransi yang tinggi dan senantiasa tercipta kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat yang ada di kota multikultural tersebut.

4. SIMPULAN

Bitung adalah sebuah daerah yang berada di Sulawesi Utara. Perjalanan sejarah Bitung tidak terlepas dari perjuangan Simon Tudus dan istrinya Mampirang. Sosok Simon Tudus dan Manpirang lah yang pertama kali menghuni daerah Bitung sekitar abad ke-19. Di masa ini, Bitung masih berupa hutan liar, tempat sarang nyamuk, ular berbisa, monyet dan jenis binatang lainnya. Simon Tudus sebenarnya berasal dari Sawangan Airmadidi. Berawal dari suatu kemauan dan tekadnya untuk membuka kebun (*huma*) di kawasan yang terletak di tepian pantai, Simon Tudus membangun sebuah gubuk sejenis pondok untuk tempat berteduh. Di pondok itu Simon Tudus selalu menyalakan api

sehingga selalu terang. Apabila cuaca buruk pada saat melaut pondok yang dihuni Simon Tudus itu menjadi tempat singgah dan berteduhnya para nelayan tradisional yang berasal dari Kema, Tondano, Gorontalo, Makassar, Bugis, Ternate, Tidore dan Sangir. Dari kisah ini, Simon Tudus dan Mampirang merupakan orang pertama yang datang di Bitung.

Tahun 1918, Bitung menjadi desa yang diakui secara administrasi. Selanjutnya di tahun 1927 resmi menjadi sebuah desa yang mandiri. Elias Lonto Sompotan (cucu Simon Tudus) yang diangkat sebagai Hukum Tua pertama, kemudian di tahun 1929 Hukum Tua digantikan oleh Hendrikus Langelo. Di masa Langelo, pemukiman di Bitung makin ramai dikunjungi oleh berbagai suku bangsa khususnya yang berasal dari Sangir Talaud, Kema, Gorontalo, Maluku, Ternate, Bugis, Bolaang Mongondow, Tidore dan lain-lain. Adapun mata pencaharian para pendatang ini adalah nelayan, petani, tukang bangunan dan lain-lain. Sebagai sebuah desa yang mandiri, Bitung terus berkembang.

Tahun 1947, Bitung resmi menjadi distrik bawahan (*onderdistrik*) yang terpisah dari distrik Kauditan. Adapun Hukum Tuanya adalah B. Ompi. Pada masa B. Ompi, Bitung bertambah luas menjadi 11 desa dengan luas wilayah 19.870 Ha, dan jumlah penduduk sebesar 13.428 jiwa. Melihat perkembangan daerah Bitung yang semakin ramai dengan aktivitas pelabuhannya, maka Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 244 tahun 1964 tentang perubahan status Bitung dari *onderdistrik* menjadi Kecamatan Bitung. Sejak menjadi kecamatan, luas wilayahnya bertambah menjadi 29.788 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 32. 000 jiwa yang tersebar di 28 desa. Pada tanggal 10 April tahun 1975 Kecamatan Bitung diresmikan menjadi kota administrasi. W. A. Worang diangkat sebagai walikota pertama Bitung. Ketika itu daerah Bitung semakin berkembang dengan luas wilayah 30.400 Ha, terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa. Sejak menjadi kota administrasi, penataan wilayah mulai dilakukan utamanya pembangunan infrastruktur kota seperti perkantoran, penerangan, jalan dan pengadaan fasilitas lainnya sebagai penunjang aktivitas masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, pemeritahan, politik dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990, tepat tanggal 10 Oktober tahun 1990 Kota Administrasi Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung. Rudini selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang meresmikan Bitung sebagai kotamadya. Saat itu, Sarundajang diangkat sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung yang pertama. Pada masa pemerintahan Sarundajang, Bitung semakin berkembang bahkan melebihi kota-kota lain di wilayah Sulawesi Utara. Memasuki era otonomi daerah, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 penyebutan Kotamadya Bitung berubah menjadi Kota Bitung. Selama berstatus menjadi kota, pembangunan fasilitas di dalam kota sebagai pendukung aktivitas ekonomi, sosial budaya, politik pemerintahan, dan lain sebagainya terus dikembangkan, khususnya pengembangan pelabuhan, prasarana jalan, pengadaan air bersih, pasar, fasilitas ibadah, pendidikan dan kesehatan serta pengadaan fasilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basundoro, Purnawan. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*.Yogyakarta: Ombak.

Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*; terjemahan Nugroho Nutosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

HM. Zaenuddin. 2014.*Asal Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe*. Jakarta: PT Zaytuna Ufuk Abadi.

Lomban, Max J dkk. 2009. *Bitung: Melangkah Pasti*. Bitung: Bappeda Kota Bitung Kerjasama Yayasan Serat Manado.

Purba, Jhon Rivel. 2015. *Pelabuhan dan Heterogenitas Masyarakat Bitung (1950-2007)*. Yogyakarta: Kepel.

Rabani, Laode. 2010. *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Ombak.
Rudini, dkk. 1992. *Profil Provinsi Republik Indonesia Sulawesi Utara*. Jakarta: Pemrakarsa.
Tampubolon, Edward dkk. 2015. *Bitung The New Of Indonesia In Asia Pasific* (Bitung: Bappeda Kota Bitung.
Tim Penelitian Penelusuran Wilayah Bitung. 2015. *Sejarah Terbentuknya Wilayah Bitung* Bitung: Bappeda.

B. Disertasi dan Dokumen

Pojoh, Broerie. 2010."Model Pengembangan Agro Eco Industrial Park Bitung, Provinsi Sulawesi Utara". Bogor: Disertasi pada Program Studi Pengolahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Fakultas Institut Pertanian Bogor.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Tingkat II Bitung Tahun 1995.
Badan Pusat Statistik Kota Bitung, *Bitung dalam Angka*, Tahun 1994.
Badan Pusat Statistik Kota Bitung, *Bitung dalam Angka*, Tahun 1996.
Badan Pusat Statistik Kota Bitung, *Bitung dalam Angka*, Tahun 1997.
Badan Pusat Statistik Kota Bitung, *Bitung dalam Angka*, Tahun 2001.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Bitung Tahun 2001.
Badan Pusat Statistik Kota Bitung, *Bitung dalam Angka*, Tahun 2005.

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak William, 2017
Wawancara dengan Bapak La Site, 2017